

KONFLIK STATUS DAN KEKUASAAN ORANG BATAK TOBA

Oleh: Bungaran Antonius Simanjuntak

Dalam penulisan disertasi penulis tentang konflik orang Batak Toba yang selalu terjadi, terutama sebelum dan sesudah kemerdekaan R.I. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab konflik tersebut sehingga konflik berlangsung secara intens dan berkelanjutan. Sehingga konflik berlangsung secara periodik. Faktor-faktor tsb dikemukakan sebagai berikut.

1. Problem sosial budaya:

Kontroversi antara pandangan hidup dan kenyataan

1. 1. Idealisme, Inkonsistensi, dan Kontroversi

Nilai budaya yang menjadi tujuan dan pandangan hidup ideal asli orang Batak Toba dirumuskan di dalam rangkaian tiga kata yang secara eksistensial saling mendukung yaitu *hamoraon*, *hagabeon*, *hasangapon*, kekayaan, keturunan, dan kehormatan¹. Metode pencapaian pandangan hidup diatur oleh struktur sosial *dalihan na tolu*² yang keberadaannya berdasar kepada sistem garis keturunan kebapaan berwujud *marga*. Kemudian aplikasi struktur itu dijabarkan di dalam sistem sosial berupa tatanan adat istiadat, kepercayaan, dan idealisme.

Di dalam penerapan sistem sosial, ternyata sering terjadi penyimpangan yang merugikan berbagai pihak yang menimbulkan benturan-benturan. Pencapaian tujuan hidup kekayaan, keturunan, dan kehormatan justru menjadi alasan bersaing dan bertikai. Berbagai pengaruh dari dalam (enkulturasi, sosialisasi) maupun dari luar (akulturasi, asimilasi dan penetrasi) mendukung persaingan dan konflik menjadi lebih intensif. Situasi demikian bertentangan dengan nilai baru *hadameon*, perdamaian dan *hasadaon*, persatuan, yang dibawa oleh agama Kristen maupun nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini terjadi keadaan inkonsistensi dan kontroversi

¹ Perkenalan dengan agama Kristen dan nasionalisme Indonesia menambah unsur idealisme baru yakni, *hadameon*, *hasadaon*, perdamaian dan persatuan,

² Tungku masak bertaki tiga.

antara idealisme dengan kenyataan (Horton dan Hunt, 1972). Karena nilai-nilai budaya tradisional masih mendominasi sikap dan perbuatan sebagian besar warga masyarakat daripada nilai-nilai modern yang diakseptasi.

Orang Batak Toba berada pada posisi peralihan antara keinginan menjadi orang modern dan taqwa kepada agama baru, serta tetap melaksanakan nilai kebudayaan tradisional yang mengandung nilai kepercayaan yang *totalitas panteistis*. Bahkan sering diusahakan menempelkan nilai-nilai agama Kristen kepada berbagai nilai dan lambang kebudayaan tradisional agar tampak tidak bertentangan (Irapas, 1976).

Akhirnya pada suatu peristiwa mereka menjadi orang Batak Toba tradisional dan secara terpisah pada peristiwa lain menjadi orang Batak Indonesia modern. Dapat terjadi pada satu peristiwa modern nasional pejabat Batak Toba **m**emberlakukan nilai, tradisional kepada sesama orang Batak. Dalam hal ini tampak bahwa *liquidity* struktur sosial *dalihan natolu* membentuk *liquidity* sikap hubungan sosial sesama Batak dalam situasi modern nasional. Dalam hubungan sosial pada masyarakat pluralistik, aksi tersebut di atasi merupakan gejala *penyemuan jati diri* atau sedang berada pada situasi kesukuan *marginal*.

1.2. Perubahan Sosial Budaya dan Berbagai Kontroversi.

Perubahan sosial Batak Toba terjadi karena adanya proses transmisi dari suatu kebudayaan asing kepada kebudayaan Batak Toba melalui jalur difusi, asimilasi, akulturasi yang berkesinambungan (Beals at. al, 1977), yaitu melalui pengembangan agama Kristen, penyelenggaraan pendidikan gaya barat, pengenalan cara hidup modern, dan sebagainya. Cara perubahan terjadi melalui evolusi, fungsional dan konflik (Zanden, 1990).

Tidak semua variabel sama daya pengaruhnya di dalam menciptakan perubahan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa bagi orang Batak Toba, tampaknya pengaruh variabel pendidikan dan ideologi (dalam hal ini agama) berperan sangat dominan (*Immanuel*, 1890-1933). Kedua variabel tersebut membawa perubahan drastis dalam cara hidup yang homogen tertutup menjadi heterogen terbuka. Sistem sosial yang berorientasi keturunan ke sistem organisasi modern yang bermuatan status formal. Persaingan *genealogik* keluarga besar, menjadi, persaingan rasional yang berorientasi kepada kekayaan, jabatan, dan kekuasaan. Sistem kepercayaan *panteistis-totalitas* menjadi *monoistik* Kristiani.

Sistem perdagangan orientasi pasar lokal menjadi, pasar regional, nasional, dan internasional yang teratur. Sistem berfikir yang emosional, lokal menjadi rasional nasional. Terbukti munculnya organisasi pembela kepentingan rakyat dan bercita-cita mandiri berdasarkan kemerdekaan bernama *Hatopan Kristen Batak* pada 1917 (*Immanuel* No. 45, 1917). Perubahan sosial budaya itu sudah jelas menimbulkan benturan sosial antara yang sudah siap dengan yang belum siap menerima perubahan maupun sebagai subjek perubahan.

Perubahan tersebut di atas melahirkan situasi yang menggambarkan terjadinya rebutan pengaruh antara nilai budaya tradisional dengan nilai agama dan budaya modern dikalangan orang Batak Toba. Situasi *marginal* demikian menimbulkan sikap-sikap ragu, jati diri semu, yang cenderung menimbulkan perbuatan dan aksi-aksi yang tidak konsisten bahkan kontroversial.

Dalam bidang kepercayaan, terjadi penerapan kepercayaan yang sifatnya panteistis serentak dengan ajaran agama Kristen yang sifatnya monoistis (Zoetmulder, 1991). Pada upacara tertentu dewa *Debata Mulajadi Nabolon* dipanggil oleh pemimpin upacara (Tobing, 1963), padahal sebelumnya seorang rohaniawan Kristen telah memanggil Yesus hadir pada pembukaan upacara. Situasi inkonsistensi terjadi saat pengakuan sebagai umat Kristen, tetapi masih melakukan aktivitas kepercayaan panteistis totalitas Batak tradisional. Dengan demikian terjadi pencampur adukan kepercayaan import dengan kepercayaan asli, yang justru mengaburkan kedua ajaran dan menimbulkan ajaran *sinkretisme* (Tideman, 1936)¹.

2. Konflik Batak Toba: Konflik Status dan Kekuasaan

2.1. Tradisionalisme dan Modernisme

Sikap dan pandangan masyarakat selalu berorientasi kepada tradisi maupun modernisasi. Tradisi berupa kepercayaan serta kebiasaan warisan dari masa lampau yang cenderung statis dan hakekatnya abadi (Weiner, 1966). Penganut faham ini tidak dapat menerima kebiasaan baru atau memodifikasi kebiasaan lama karena takut kepada kutukan roh nenek moyang dan dewata (Tobing, 1963).

Modernisasi adalah proses transformasi suatu perubahan pandangan atau

¹ Menelusuri pendapat Tideman, *sinkretisme* telah ada sejak agama asli Batak berkenalan dengan ajaran Hindu dari India. *Sinkretisme* tahap pertama ini berkenalan lagi dengan ajaran agama Kristen dan Katolik serta budaya barat, melahirkan *sinkretisme* baru (tahap kedua)

ideologi, teknik dan ilmu pengetahuan dan sebagainya dalam segala aspek (Schrool, 1981; Wood, 1966). Proses transformasi dipandang sebagai, pengganggu stabilitas dan kontinuitas hubungan dengan roh nenek moyang serta kesetiaan kepada Tuhan (Sinaga, 1981, 1983; Tobing, 1963). Situasi demikian menimbulkan konflik tradisionisme lawan modernisme di dalam masyarakat dan organisasi agama Kristen HKBP sejak 1917 hingga kini (1994).

Sehubungan dengan perubahan tersebut di atas terdapat tiga kelompok sosial di dalam masyarakat Batak Toba yaitu penganut paham tradisional, kelompok situasional yaitu yang bersikap tradisional dan modern sesuai kebutuhan, dan penganut modernisme. Situasi konflik terjadi antara penganut modernisme dan tradisionisme, demikian juga dikalangan penganut gabungan kedua paham.

2.2. Konflik Status

Telah disebutkan bahwa di dalam ideologi Batak Toba kekayaan, *hamoraon* adalah salah satu tujuan hidup. Kekayaan dipergunakan untuk memperoleh status yang bermuatan kekuasaan. Semakin besar kumulasi kekayaan, semakin besar modal, yang pada akhirnya akan memperbesar kekuasaan (Russel, 1988). Walaupun kekuasaan pada akhirnya akan menghasilkan kekayaan, akan tetapi yang pertama ialah memaknai kekayaan untuk memperoleh kekuasaan. Minimal dapat mempengaruhi pemegang kekuasaan atau mengarahkannya sesuai, kehendak pemilik kekayaan.

Perebutan status mulai terlihat pada persaingan meningkatkan pendidikan. Bagi orang Batak Toba faktor kekayaan tidak merupakan fasilitas yang membedakan keinginan untuk berpendidikan tinggi. Semua orang bersaing untuk memperoleh pendidikan yang dipandang sebagai jalur utama memperoleh status sosial formal. Pendidikan dan status memberi prestise dan kehormatan, *hasangapon* yang didambakan sebagai, unsur kedua tujuan hidup, Bahkan tingkat pendidikan cenderung mempengaruhi sikap dalam menentukan pilihan tempat tinggal menetap. Terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin cenderung untuk meninggalkan kampung halaman.

Demikian juga untuk mempertahankan status baik formal maupun tradisional orang akan bersikap sangat reaktif dan kritis. Baik yang kaya maupun yang miskin sama-sama mempertahankan status dengan gigih. Hal ini terlihat pada saat pembagian warisan maupun pemberian *jambar* sebagai lambang status, bila dianggap tidak sesuai akan ditolak, yaitu secara ekonomis cukup berharga.

Demikian juga sikap hormat kepada pemberi istri, *hulahula*, secara prinsip adalah sama pada semua golongan kekayaan dan pendidikan. Namun belakangan ini faktor kekayaan jabatan dan pangkat *hulahula*, sudah diperhitungkan dalam konteks penghormatan.

2.3. Konflik Kekuasaan

Seperti telah dikemukakan pada bab konflik status bahwa bagi orang Batak Toba kekuasaan sangat penting. Hal itu tergambar pada tujuan hidup *hamoraon*, *hagabeon*, *hasangapon* yang mengandung esensi kekuasaan. Memakai kekayaan untuk memperoleh kekuasaan. Demikian juga bila mempunyai banyak keturunan, *parbalga tubu*, maka *people power* akan dimiliki. Melalui *hasangapon*, kehormatan, maka kekuasaan akan diperoleh. Karena itu diperlukan terlebih dahulu usaha memiliki kekayaan dan keturunan agar kehormatan diperoleh. Dengan memiliki kekayaan, keturunan yang banyak dan kehormatan maka kekuasaan otomatis diperoleh. Ketiga unsur saling menunjang (Russel, 1988).

Adalah merupakan prinsip bagi orang Batak Toba, bahwa orang yang kaya tetapi tidak mempunyai keturunan¹ kurang dihormati dan tidak mempunyai kewenangan dalam upacara-upacara adat. Karena hanya orang yang kaya, dan berketurunan yang dipandang mampu dan layak memberi restu kepada orang lain. Orang yang banyak keturunan tapi miskin juga dikategorikan sebagai tidak terhormat dan tidak berkuasa. Karena itu landasan kekuasaan ialah kepemilikan kekayaan dan keturunan. Padahal diketahui bahwa setiap perbedaan tingkat kekayaan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan menimbulkan persaingan dan konflik untuk memperkecil atau memperbesar jarak sosial atau memperthankan yang telah ada, *statusquo*

Pendidikan modern telah memfasilitasi orang Batak Toba untuk memperoleh jabatan, kedudukan sosial di dalam lembaga birokrasi, masyarakat dan organisasi sosial politik. Akan tetapi dalam persoalan perubahan pandangan terhadap adat sebagai salah satu unsur ideologi, pendidikan dan jabatan tidak mampu berperan. Gagasan pejabat dan cendekiawan untuk merubah adat demi alasan efisiensi maupun penyelamatan sumber daya ekonomik dari pemborosan,

¹ Yang dimaksud keturunan ialah anak laki-laki dan perempuan. Namun perempuan karena tidak melanjutkan garis keturunan ayah, sehingga tidak diperhitungkan. Bila tidak punya anak laki-laki dinamakan *punu* artinya yang bersangkutan punah dari pohon silsilah *hariera sundung di langit*

tidak mampu merubah pandangan rakyat dari tradisi adat warisan nenek moyang. Demikian juga dalam soal harta warisan yang mungkin dari sudut pandang ekonomik kurang bernilai, namun secara religi nilainya tinggi, maka baik orang kaya maupun miskin akan terlibat konflik yang intensnya tinggi. Sebab dalam hal ini konflik mempertaruhkan kehormatan, legalisasi dan legitimasi genealogik. Sebab dengan perantaraan harta warisan tersebut akan terpelihara hubungan batin dan roh dengan arwah, *tondi* para leluhur.

3. Peta Evolusi Konflik Batak Toba:

Kasus perpecahan Gereja HKBP

3.1. Konflik HKB lawan Zending Jerman

Sejak awal abad XX konflik Batak Toba yang paling menonjol ialah dalam bidang agama. Gejala konflik mulai terasa pada tahun 1917 saat berdiri organisasi sosial politik *Hatopan Kristen Batak (HKB)*¹ (*Immanuel* No.45.1917). Berdirinya *HKB* diinspirasi oleh organisasi politik *Boedi Oetomo* 1908 *Insulinde* dan *Par tai Sjarikat Islam* (Pedersen, 1975, Hutauruk, 1986).

Konflik pertama terjadi karena *HKB* menuntut otonomi luas bagi gereja HKBP. Pimpinan zending *RMG* dituntut menyertakan pendeta pribumi sebagai pengambil keputusan, memisahkan soal gerejani dari pemerintahan sipil, demokratisasi gereja dengan menghapuskan otoritas pendeta Jerman, pembentukan dewan gereja dan dewan keuangan (Pedersen, 1975). Tuntutan itu ditolak pimpinan gereja karena dianggap berbau politik. *HKB* dituduh bekerja sama dengan partai *Insulinde* yang dicap separatis dan menentang pemerintah Hindia Belanda demi kemerdekaan (*Immanuel* No. 26-27, 1918). Tuduhan tersebut dihubungkan oleh pimpinan gereja dengan adanya perlawanan *HKB* terhadap kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang akan mengambil alih tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan swasta di desa Pansurbatu dan Pahae. *HKB* mengorganisasi demonstrasi ribuan orang menentang gagasan tersebut (*ARB* No.XX, 1922). Alasan lain yang dipersoalkan ialah, pimpinan zending sama sekali tidak berkeinginan melepaskan kekuasaan dari HKBP karena dianggap belum mampu melayani umat dengan baik (Lumban Tobing, 1992).

¹ Kemanunggalan Kristen Batak.

3. 2. Konflik HKBP lawan Zending Belanda

Di samping konflik agama yang timbul dari dalam sebagai manifestasi perlawanan terhadap dominasi bangsa asing, konflik yang bersumber dari luar direkayasa oleh pemerintah Hindia Belanda secara organisatorial. Pemerintah membentuk organisasi *Batak Nias Zending* (BNZ) untuk menggantikan kedudukan RMG yang dibubarkan, sebagai akibat peperangan negeri Belanda dengan Jerman pada perang dunia ke II, serta mengambil alih semua asset *zending* dan HKBP (*Zendingconsuls*, 1941). Sebagai badan hukum, HKBP melakukan perlawanan di bawah pimpinan *ephorus* pribumi pertama Pendeta K.Sirait. Kelompok elit Batak Toba di Batavia mendukung perlawanan HKBP. Tetapi sebagian elit Toba lainnya mendukung aksi BNZ dengan tuduhan bahwa pimpinan HKBP telah menelantarkan pelayanan rohani warga dan hanya mengurus administrasi gereja. Pimpinan hanya mencari kehormatan pribadi. Gereja telah berubah menjadi gereja pegawai, *ambtenaarsherk* (Nainggolan, 1941). Sejak itu elit Batak Toba terpecah menjadi dua kubu, yakni pendukung Belanda dan pendukung HKBP.

Aksi, pengacauan BNZ lebih lanjut ialah membebaskan *guru zending* dari tugas kegerejaan dan hanya melayani sekolah *zending*, karena gaji diterima dari BNZ. Karena itu timbul kelompok-kelompok konflik potensial di kalangan intern *guru zending*, antara *guru zending* dengan pendeta Batak maupun Belanda yang merupakan atasannya, antara pendeta Batak dengan pendeta Belanda, antara pimpinan HKBP yang pribumi dengan pimpinan BNZ orang Belanda. Konflik ini tidak pernah berakhir secara tuntas dan hilang setelah Jepang menjajah Indonesia 1942 (Sihombing, 1961).

3.3. Konflik HCB lawan HKBP

Di Pematang Siantar (1927), Medan dan Batavia (1929) berdiri gereja muda sebagai pecahan dari HKBP dinamakan *Hoeria Christen Batak (HCB)*, *Mission Batak*, *Punguan Kristen Batak*, *Partai 123*. Tokoh pendiri gereja-gereja tersebut bukan tokoh HKB yang memperjuangkan kemandirian dan kemerdekaan. Tetapi rupanya idealisme HKB telah menular sampai ke luar wilayah Tapanuli Utara. Keinginan mandiri, serta adanya sistem pelayanan gereja yang terpusat, *sentralisasi*, menyebabkan timbul keinginan memiliki gereja sendiri, *desentralisasi*. Penolakan keinginan tersebut oleh pimpinan HKBP dan *zending* menimbulkan perlawanan.

HKBP berusaha membubarkan HCB melalu intimidasi. Melarang warga HKBP berhubungan dengan warga HCB. Meminta bantuan pemerintah agar membubarkan HCB. Memuduh pengurus HCB sebagai *bandit* dan tidak ada yang berpendidikan teologia, serta ada hubungannya dengan gerakan komunis di Madiun (Hutauruk, 1980; Pedersen, 1975).

Konflik HCB melawan HKBP dan zending tidak seimbang, karena warga asset HCB hanya terdiri dari golongan buruh dan petani. Asset warga HKBP terdiri dari, petani, pejabat, cendekiawan serta dukungan lembaga misi asing dan pemerintah. Sementara itu HCB berdiri sendiri. Bahkan pemerintah tetap mempersulit dan mengawasi gerakan HCB melalui *politieke inlichting dienst*. Satu-satunya modal dasar HCB ialah semangat perjuangan untuk merdeka dari kekuasaan orang asing. (Sitorus, dkk, 1978).

Pengakuan pemerintah kepada HCB sebagai badan hukum meningkatkan semangat perjuangan dan pengembangan gereja. Akan tetapi selaras dengan itu muncul intrik yang menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok di antara pimpinan berupa rebutan jabatan dan kekuasaan. Akibatnya timbul konflik tahun 1934 yang mengarah kepada perpecahan. Dengan alasan keamanan, pemerintah mengancam akan mencabut status badan hukum HCB bila tidak berdamai. Campur tangan tersebut menghasilkan perdamaian dan kerukunan semu. Klimaks konflik internal HCB terjadi antara pimpinan pusat yang syah di Pematang Siantar, dengan kelompok HCB Tapanuli Utara serta kelompok pimpinan HCB yang lama. Walaupun antiklimaks konflik itu berakhir pada pergantian nama HCB menjadi Huria Kristen Indonesia (HKI) tahun 1946, namun konflik lanjutan masih terjadi antara pimpinan pusat HKI dengan pendiri HCB dalam soal asset material (Ibid, 1978).

Gereja baru HKI (1946) mewarisi konflik HCB dengan HKBP serta semua dampak isolasi dari lembaga-lembaga gereja nasional dan internasional akibat strategi politik isolasi oleh HKBP. Permohonan HKI menjadi anggota Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI)¹ pada mulanya selalu diveto oleh HKBP. Akan tetapi, sejak timbulnya konflik HKBP tahun 1962 yang melahirkan GKPI 1964 telah membawa keberuntungan bagi HKI. Untuk mengurangi "*musuh*", tahun 1965 HKBP meninggalkan politik isolasi kepada HKI dengan mendukung gereja itu menjadi anggota DGI dan dewan gereja-gereja Protestan se-dunia.

¹ Sekarang bernama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

3.4. Konflik GKPI lawan HKBP

Ada dua kasus yang menjadi penyebab konflik GKPI¹ yaitu penolakan perubahan anggaran dasar dan struktur gereja HKBP (GKPI, 1975). *Ephorus* Warneck pada tahun 1920 meminta partisipasi warga di dalam pekerjaan gereja. Kepada *raja* (kepala desa) dan pemuka masyarakat diberi jabatan bendahara, *kasbestuur*, dan kepada rakyat biasa diberi jabatan *sintua* sebagai pengelola rohani dan menjadi ketua majelis bila *guru huria* belum ada. Sadar adanya kejanggalan fungsi dan jabatan tersebut, kelompok *kasbestuur* menuntut perubahan agar mereka tidak hanya menjadi pengelola kekayaan gereja, tetapi juga menjadi pengelola rohani dan menjadi ketua majelis (Hutauruk, 1986). Tuntutan ini tampaknya berdasar kepada struktur sosial, sebab kelompok *kasbestuur* berasal dari para kepala desa atau tokoh masyarakat, sementara kelompok *sintua* adalah rakyat biasa. Namun di dalam kepengurusan gereja para kepala desa dan tokoh itu (*kasbestuur*) di bawah subordinasi rakyat biasa. Struktur ini pada *sinode* tahun 1962 dihapuskan. *Sinode distrik* dan *sinode ressort* juga diiadakan. Perubahan itu menyuhut konflik di dalam HKBP sehingga timbul gereja GKPI.

Warga HKBP tampaknya belum siap mental menerima perubahan struktural dan fungsional. Di samping itu ada kesan bahwa pimpinan HKBP, *ephorus* dan *sekretaris jenderal* melakukan perubahan struktur dan anggaran dasar sebagai strategi untuk mempertahankan jabatan atau menjamin agar *sekjen* dapat meraih jabatan *ephorus*. Perubahan struktur dioperasionalkan dalam bentuk mutasi *pendeta ressort*, sebagai aksi penggalangan pendukung.

Untuk menggagalkan maksud dan tujuan strategi itu, timbul gerakan perlawanan dari para pendeta yang digusur beserta warga pendukungnya dalam bentuk, organisasi informal a.l. bernama *Dewan Koordinasi HKBP 1950*; *Dewan Koordinasi Patotahon HKBP* (GKPI, 1975; Hutauruk, 1986; Simanjuntak, 1993) Pada awalnya organisasi informal itu bertindak sebagai mediator. Namun karena tuntutannya tidak diindahkan oleh pimpinan pusat HKBP organisasi *Dewan Koordinasi Patotahon HKBP* berubah fungsi menjadi subjek yang melawan secara frontal. Dengan program "mengambil alih tugas *ephorus* HKBP", organisasi ini

¹ Penulis memakai judul konflik GKPI hanya untuk mempermudah pangelompokan orang yang saling bertikai. Pada saat konflik itu, sebenarnya GKPI belum ada. Yang ada baru warga yang menentang pimpinan HKBP yang merupakan *cikal bakal*, yang kemudian menggabungkan diri menjadi anggota gereja GKPI.

dapat dituduh sebagai pelaku perebutan kekuasaan, *coop d'etat* (Simanjuntak, 1993).

Klimaks konflik internal HKBP terjadi saat campur tangan pemerintah daerah Sumatera Utara Gubernur Kol. Ulung Sitepu didepan pimpinan HKBP dan para oposan memutuskan melarang semua aktivitas organisasi informal dengan memakai nama HKBP. Dengan demikian gerakan perlawanan internal berakhir. Sebagai *Way out* kelompok oposan memutuskan keluar dari HKBP dan mendirikan gereja GKPI 1964.

3.5. Konflik Perebutan Kekuasaan di HKBP

Terdapat preseden bahwa jabatan *sekretaris jenderal (sekjen)* merupakan jalur strategis untuk mencapai jabatan puncak *ephorus* setelah keberhasilan mantan *sekejn* Ds. T. Sihombing dan Ds G.H.M. Siahaan. Karena itu Ds. P. M. Sihombing sebagai *sekjen* mempersiapkan diri dengan membina para pendeta. Di luar gereja aktif pada organisasi Golkar, serta membina kerja sama dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Untuk memenangkan pemilihan *ephorus*, terjadi negosiasi rahasia tiga tokoh di Polonia Hotel di Medan awal 1987 antara Ds. P. M. Sihombing, Rajagukguk SH dan Dr. Soritua Nababan. Diputuskan bahwa Sihombing jadi *ephorus* di HKBP, Nababan ketua PGI¹ Ternyata Nababan turut dicalonkan dalam pemilihan *ephorus* HKBP tahun 1987 dan menang. Sihombing menuduh Nababan mengkhianati *kesepakatan Polosnia* dan melakukan perlawanan melalui kelompok *par-ritrit*.

Pergolakan semakin besar setelah mahasiswa dan dosen simpatisan *par-ritrit* di Universitas HKBP Nommensen melakukan unjukrasa dan menuntut Nababan turun dari jabatan *ephorus*. Pembakaran laboratorium sebagai rangkaian aksi unjuk rasa tidak berhasil diusut tuntas pihak kepolisian.

Berbagai kelompok formal, dan informal turut mencampuri konflik internal HKBP, antara lain Tim Damai di bawah pimpinan Jen (purn) M. Panggabean Ketua DPA (waktu itu), perusahaan PT. Inti Indo Rayon yang mendukung mantan *sekjen* P.M.Sihombing. Berbagai forum yang tumbuh dari kalangan warga dan *sintua*, serta pemerintah melalui Gubernur dan ketua Bakorstanasda/Panglima Kodam I Bukit Barisan.

¹ Simorangkir, mantan *sekjen* HKBP, wawancara 27-4-1993.

Konflik yang pada mulanya hanya di antara pendeta dan pengurus pusat HKBP, menjalar ke kalangan warga secara terbuka setelah campur tangan pemerintah melalui Ketua Bakorstanasda yang mengangkat Pendeta Dr. S.M.Siahaan menjadi pejabat *ephorus*. Keputusan campur tangan tersebut dituangkan dalam Skep/3/Stada/XII/1992 tanggal 23-12-1992.

Akibat keputusan itu ribuan warga HKBP melakukan penolakan dengan demonstrasi ke kantor Gubernur, DPRD dan markas Kodam I Bukit Barisan. Korban dari warga berjatuhan dan tentara melakukan penangkapan, Pelantikan pejabat *ephorus* terpaksa dipindahkan dari Pearaja ke Sipoholon karena sekitar 5000 warga HKBP menduduki kantof pusat HKBP, menolak kehadiran Pangdam I dan pelantikan Pdt, Dr. Siahaan.

Konflik menjalar ke semua gereja HKBP di Indonesia. Sebagian besar menolak kebijaksanaan dan campurtangan pemerintah. Penyelenggaraan *sinode agung istimewa (SAI)* pertengahan february 1994 semakin memperuncing keadaan. Penindasan oleh *preman* dan aparat keamanan ditujukan kepada pendukung Nababan yang menamakan diri *Setia Sampai Akhir(SSA)*. Tampaknya aparat keamanan tidak netral, tapi *mem-back up* setiap aksi kelompok pimpinan Dr. P.W.T. Simanjuntak dan Dr. S.M. Siahaan pilihan *SAI*¹. Perpecahan gereja terjadi di sebahagian besar wilayah. Perkelahian warga untuk memperebutkan gereja menimbulkan pertumpahan darah. (*Sentana, 1992-1993; Detik, 1994*).

Untuk meredakan situasi pemerintah menugaskan Menteri Penertiban Aparatur Negara T.B. Silalahi mendamaikan kelompok yang berseteru. Rekonsiliasi ditandatangani kedua *ephorus*, Nababan dan Simanjuntak (*Kompas, 1993*). Isi pernyataan rekonsiliasi itu merugikan perjuangan pendukung Nababan, *SSA*². Di lapangan kelompok *SAI* tidak mematuhi keputusan rekonsiliasi. Gagasan perdamaian itu tidak menghasilkan apa-apa dan konflik HKBP tetap tidak berakhir.

¹ Dok. No. 15/93; Dok. No. 22/93; Dok.No.26/93

² Terdapat dugaan di kalangan elit kelompok SSA ada kaitan antara rekonsiliasi gagasan Men.Pan Silalahi dedngan konferensi kelompok G-7 di Tokyo.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Analisis hasil penelitian konflik sosial, adat dan gereja menunjukkan bahwa bagi orang Batak Toba status dan kekuasaan merupakan lembaga strategis untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan. Kekayaan adalah modal untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan adalah jalur yang strategis untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan. Karena itu setiap persaingan untuk merebut status dan kekuasaan akan menimbulkan konflik. Karena itu hipotesis pertama dan ke-lima terbukti benar.

2. Sistem dan struktur sosial, ideologi dan sistem nilai budaya merupakan lembaga yang amat menentukan format sikap dan intensitas konflik sosial. Bila terjadi keraguan terhadap kebudayaan sendiri maupun kebudayaan modern, akan mengakibatkan timbulnya sikap inkonsisten dan kontroversi yang akan menimbulkan konflik internal yang berakibat disintegrasi masyarakat. Kesimpulan ini mendukung kebenaran hipotesis ke-dua dan ke-empat.

3. Di dalam struktur sosial, *dalihan na tolu* ternyata status anggota dapat berganti-ganti sehingga struktur itu bersifat *liquid*. Kelabilan status demikian menimbulkan keraguan dan ketidak pastian sikap pemilik status baik non-formal maupun formal. Kelabilan status demikian juga mendukung keinginan orang untuk mengaburkan identitas demi tujuan tertentu. Dengan kesimpulan demikian maka hipotesis ke-tiga juga didukung.

4. Analisis berbagai kasus konflik sosial dan agama yang pernah terjadi, dapat disimpulkan ternyata tingkat pendidikan, status, jabatan atau pangkat, bahkan agama tidak mampu meredam konflik. Tetapi justru menjadi faktor penyebab dan fasilitator konflik. Demikian juga struktur sosial *Dalihan Na Tolu* dalam situasi konflik tidak efisien sebagai lembaga pengatur hubungan dan tertib sosial.

5. Tujuan hidup yang di abstraksikan dalam *hamoraon*, *hagabeon*, *hasangapon*, kekayaan-keturunan-kehormatan berakar dalam kebudayaan serta legalisasi realisasinya melalui ungkapan-ungkapan folklor, merupakan sebab konflik siring terjadi sejak dahulu hingga sekarang.

6. Bila sikap pandang warga, pemimpin dan pemerintah terhadap organisasi keagamaan diperlakukan sama dengan sikap pandang terhadap organisasi sosial dan politik maka dapat dipastikan konflik dan perpecahan akan selalu terjadi di

dalam organisasi keagamaan. Demikian pula perpecahan agama akan terjadi bila terdapat kegiatan untuk memperoleh kekayaan, kehormatan dan kekuasaan serta tujuan-tujuan yang non-agamis dengan cara mengakumulasi potensi pengaruh dan kekuatan di dalam atau melalui organisasi keagamaan.

7. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menolak salah satu dalil Coser (1956), yang mengatakan bahwa konflik internal dapat membangun kembali, kohesi sosial. Memang ada integrasi pasca konflik, tetapi hanya temporal dan bukan antara kelompok induk dengan kelompok sempalan. Integrasi terjadi hanya di dalam kelompok induk secara internal dan hanya di dalam kelompok sempalan. Konflik selalu terjadi di dalam kelompok secara berulang-ulang, karena sumber penyebabnya berupa keinginan dan kepentingan tidak pernah berakhir.

Dengan demikian kesimpulan diatas telah menjawab permasalahan dan hipotesis acuan penelitian. Walaupun akan ditolak oleh orang Batak Toba dan yang terkait, namun perlu disarankan hal-hal berikut:

1. *Differensiasi gereja*: dengan dasar tradisi *mamungha huta*, membuka desa baru di dalam kebudayaan Batak Toba, agar salah satu kelompok yang terlibat konflik disarankan mendirikan gereja baru sehingga konflik menjadi reda.

2. *Indonesianisasi*: disarankan agar gereja Batak Toba tidak eksklusif. Warga dan pimpinan gereja supaya boleh dari etnis yang berbeda (lain).